

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang hampir semua Negara menghadapi permasalahan ini terutama Negara yang berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak Negara Indonesia berdiri dan sampai kini masih belum mampu diatasi. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. Tetapi, berhubungan juga dengan dengan anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah, pendapatan dan juga masalah ketenagakerjaan.

Pada penelitian ini analisis yang dilakukan yaitu mengenai kemiskinan semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera menggunakan variabel Belanja Modal, Bantuan Sosial, PDRB dan Pengangguran di Pulau Sumatera selama periode 2015-2018.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut

:

1. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di 10 provinsi di Pulau Sumatera.
2. Bantuan Sosial tidak mampu menekan angka kemiskinan di Pulau Sumatera.
3. Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di 10 provinsi di Pulau Sumatera.
4. Angka pengangguran tidak signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera.

Dengan hasil yang didapatkan maka disimpulkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan hanya variabel belanja modal, sdangkan variabel lain belanja sosial, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak mampu menekan angka kemiskinan.

5.2.Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti memiliki beberapa saran untuk pemerintah setempat khususnya pemerintah provinsi yang ada di Pulau Sumatera beserta pihak terkat,yakni sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus konsisten dalam meningkatkan anggaran untuk dana belanja modalnya serta lebih berkonsentrasi pada peningkatan dana belanja modal.
2. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya masing-masing dan memaksimalkan sector unggulan agar porsi belanja modalnya dapat ditingkatkan sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada anggaran dana dari pusat saja.
3. Pemerintah daerah harus meninjau kembali design dalam penganggaran dana belanja modal agar penyelenggaraan dana bantuan modal bisa di maksimalkan secara baik serta bisa terhindar dari pnyelewengan dana.
4. Pemerintah daerah harus memprioritaskan dana bantuan modal daripada penganggaran dana lain karena faktanya dana bantuan modal masih belum menjadi opsi utama dalam penganggaran dana dan kalah jumlah dari dana belanja pegawai dan operasional.